

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

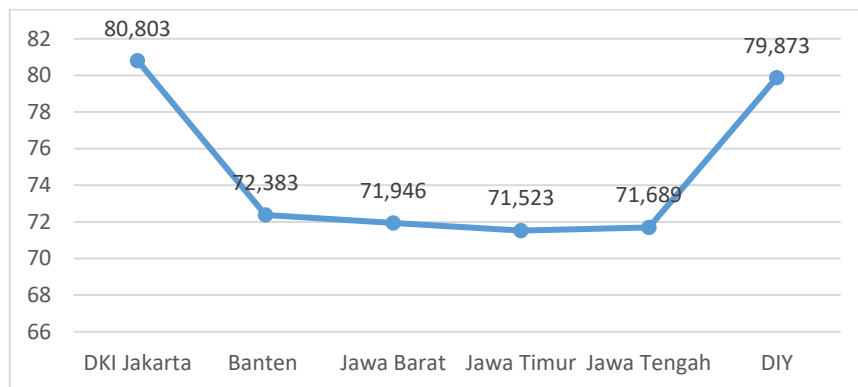
Pembangunan merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan yang merata serta peningkatan derajat kehidupan yang lebih baik. Pembukaan UUD 1945 mencantumkan tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan bagi seluruh individu tanpa terkecuali. Pelaksanaan pembangunan yang umum terjadi di Indonesia berfokus pada pertumbuhan nilai ekonomi suatu wilayah, lazim bagi negara berkembang untuk mengejar kesetaraan ekonomi dengan negara lain. Ketidak sesuaian pembangunan yang terjadi adalah pembangunan yang berfokus pada nilai produksi, produksi dan konsumsi semata tanpa melihat pembangunan manusia agar seimbang dengan pembangunan ekonomi.

Ide dasar dari pembangunan manusia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia namun tidak hanya pada kesejahteraan pada sisi ekonomi saja dari masyarakat. Namun, pembangunan yang lebih memperhatikan pada peningkatan kualitas hidup manusia. Paradigma pembangunan manusia relevan dengan tujuan pemerintah yaitu untuk mensejahterakan hidup masyarakat. Inti pembangunan manusia yaitu untuk memberikan dampak terhadap kehidupan individu. Utamanya, manusia membutuhkan akses yang lebih baik untuk mendapatkan pengetahuan,

kesehatan, kehidupan, keamanan, rekreasi, serta kebebasan politik untuk berpartisipasi dalam masyarakat (Sulistyowati, Sinaga, & Novindra, 2017).

Paradigma pembangunan yang digunakan yaitu pembangunan manusia. Pembangunan manusia menggantikan paradigma pembangunan sebelumnya yakni pembangunan ekonomi. Pembangunan manusia membuat masyarakat turut berpartisipasi membantu kehidupan mereka. Pembangunan manusia adalah sebuah pembangunan akan daya kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pembangunan ini lebih luas cakupnya ketimbang pembangunan ekonomi (UNDP, 2016).

Adapun kualitas manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index ialah suatu metode pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek hidup, pendidikan dan standar hidup. IPM digunakan untuk dapat mengklasifikasikan apakah sebuah Negara ialah Negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Jasasila , 2020).



Gambar 1.1

Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dilihat pada Gambar 1.1 menunjukkan secara rinci bagaimana kenaikan dan penurunan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun ke tahun. Pembangunan manusia yang baik yaitu ketika angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tersebut mendekati 100, sedangkan daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mendekati nol maka pembangunan manusianya buruk. Adapun kategori dalam menentukan tinggi atau rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah, yaitu status IPM sangat tinggi ≥ 80 , tinggi $70 \leq \text{IPM} < 80$, sedang $60 \leq \text{IPM} < 70$, dan rendah apabila $\text{IPM} < 60$.

Pembangunan manusia di Pulau Jawa terus mengalami kemajuan selama periode 2017 hingga 2022, dan tergolong pada kategori menengah atas. Adapun pada tahun 2017 hingga 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat rata-rata sebesar 71,946 menunjukkan peningkatan pembangunan manusia pada tahun 2017 hingga 2022 terus membaik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Indonesia pada tahun 2022 yang berada diposisi pertama dengan nilai tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan

nilai rata-rata sebesar 80,803 dan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Pulau Jawa menempatkan Provinsi Jawa Barat di posisi ke-4.

Pencapaian indeks pembangunan manusia yang berbeda antar provinsi memperlihatkan adanya ketidakmerataan pembangunan antarwilayah dalam setiap aspek pembangunan manusia. Pembangunan yang seharusnya terjadi adalah multidimensi yang antara lain didalamnya yaitu beragam perubahan fundamental pada struktur sosial, perilaku masyarakat hingga lembaga negara mencakup di dalam pembangunan selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerataan pendapatan masyarakat hingga mengurangi kemiskinan yang ada sehingga terjadi perubahan yang total pada masyarakat yang tercakup pada proses pembangunan secara keseluruhan (Ananta, 2013).

Infrastruktur yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia salah satunya adalah pendidikan. Infrastruktur dasar yaitu sekolah dikenal menjadi pendorong utama yang meningkatkan modal manusia. Jumlah sekolah secara tidak langsung dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dan pada jangka Panjang jumlah sekolah akan meningkatkan IPM (Nugroho, 2015). Kehadiran sekolah dan akses terhadap sekolah dapat meningkatkan partisipasi sekolah dan mungkin saja menyediakan sekolah dengan jarak yang dekat mampu meningkatkan partisipasi terhadap sekolah, tingkat partisipasi sekolah dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia dapat kita lihat dari dikeluarkannya berbagai kebijakan.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dikeluarkannya sebuah program wajib belajar. Dalam peraturan pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Pada tahun 2013 pemerintah pusat telah mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Adanya program lanjutan ini dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program selanjutnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai anak-anak yang putus sekolahnya sehingga ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia belum merata dan program tersebut belum sepenuhnya berhasil.

Pemerintah perlu membuat strategi yang baik sehingga memberikan kemudahan layanan dan menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas bagi warga negaranya. Majunya pendidikan dan kualitasnya merupakan salah satu faktor suatu bangsa bisa dikatakan maju, namun kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Seiring dengan kemajuan zaman yang begitu cepat ini, pendidikan yang diajarkan kepada peserta didik harus diimbangi dengan tingkat efektivitasnya sebab dengan begitu kualitas pendidikan dapat dikatakan baik jika peserta didik maupun lulusan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebaliknya, masalah bangsa Indonesia sedikit demi sedikit akan mulai teratasi apabila suatu pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga.

Jumlah sekolah mempunyai peran yang signifikan dalam proses mencapai IPM yang tinggi. Infrastruktur Pendidikan yang digunakan pada penelitian ini adalah aksesibilitas pendidikan yaitu sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri dan sekolah menengah atas negeri. Hal ini didasari sarana prasarana pembangunan, khususnya sekolah yang baru dibangun di daerah-daerah terpencil masih kurang, atau bahkan jauh dari standar nasional sarana prasarana.

Untuk menjalankan proses pendidikan dengan baik dan terencana maka diperlukan informasi yang diperlukan di dalam input proses, maka dari situlah mutu input pendidikan bisa dikatakan berkualitas dan baik. Mutu input ini bisa berupa SDM yang terdiri dari guru, siswa, dan karyawan. Kemudian mutu input juga meliputi sarana dan prasarana yang dapat mendukung jalannya proses belajar dengan nyaman dan mudah di mengerti, ada pula perencanaan pendidikan sebagai upaya untuk memprediksi apa yang akan dilakukan selama proses pendidikan berlangsung. Sementara Output dari pendidikan dapat dikatakan berkualitas jika hasil dari proses input yang telah disebutkan dapat melahirkan generasi atau lulusan yang bisa di andalkan dalam setiap disiplin ilmu. Semisal ada seorang seorang yang notabeneanya sebagai orang berpendidikan, orang ini akan menentukan suatu proses input yang berkualitas jika setelah melewati proses input dan keluar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, orang ini bisa menjadi jawaban atas apa yang dibutuhkan di masyarakat, bisa jadi sebagai pembuat lapangan pekerjaan, bisa menjadi pemimpin dan yang tidak kalah penting adalah bisa menjadikan hidupnya sendiri menjadi sejahtera dan merdeka

Infrastruktur lainnya yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia adalah infrastruktur kesehatan yaitu rumah sakit umum dan puskesmas. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak mendasar bagi semua penduduk. Keberadaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sangat menentukan pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, tercukupinya jumlah tenaga kesehatan juga merupakan faktor pendukung terwujudnya pembangunan kesehatan yang lebih baik. Fasilitas kesehatan dapat berbagai bentuk antara lain adalah puskesmas hingga rumah sakit.

Dilihat dari perspektif ekonomi, sisi penting mengenai faktor kesehatan bagi manusia akan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia (quality of human resources) itu sendiri. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia SDM akan ditentukan oleh status kesehatan, pendidikan. Dalam kegiatan perekonomian, indikator kualitas sumber daya manusia tersebut secara tidak langsung juga akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di suatu negara.

Infrastruktur kesehatan merupakan salah satu faktor kunci dari tercapainya pembangunan kesehatan di Indonesia. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai sebuah kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial, dan bukan sekedar bebas penyakit dan kelemahan fisik. Dalam prakteknya, pengukuran tingkat kesehatan yang digunakan tingkat harapan hidup. Ukuran ini merupakan salah satu dari tiga komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Infrastruktur jelas sangatlah penting. Namun disamping infrastruktur faktor yang mempengaruhi pembangunan kesehatan adalah aksesibilitas yaitu terjangkau atau tidaknya infrastruktur kesehatan itu oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui tidak semua penduduk tinggal di daerah perkotaan, kebanyakan masih tinggal di pedesaan yang mayoritas infrastrukturnya berada di perkotaan. Dan tentu juga mengenai tersedianya tenaga pelayan kesehatan merupakan hal yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pembangunan di bidang kesehatan.

Dari sisi kependudukan bahwa jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat juga mengalami kenaikan dan penurunan.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2018	48683861
2019	49316712
2020	49935858
2021	48782402
2022	49405808

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 48782402 jiwa kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 49405808 jiwa.

Menurut (Rinawati , Firda, Fahmi, Muhammad , & Agus, 2022) hal yang mendasari berpengaruhnya jumlah penduduk terhadap IPM karena perusahaan perlu adanya tenaga kerja di dalam proses produksi. Pada saat perusahaan menginginkan terjadinya peningkatan output produksi maka tenaga kerja yang akan

digunakan juga akan ditambah, oleh sebab itu kebutuhan terhadap tenaga kerja akan mengalami peningkatan. Semakin banyaknya penduduk yang dapat diserap sebagai tenaga kerja maka mereka mempunyai pendapatan yang bisa digunakan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti dapat mengakses sebuah layanan Kesehatan, mampu mendapatkan sumber-sumber kebutuhan guna hidup yang lebih layak.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dan sumber literatur diatas maka penelitian dilakukan untuk melihat dampak dari infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan jumlah penduduk terhadap IPM, maka penulis meneliti lebih lanjut tentang apa yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh karena itu penulis merumuskan penelitian dengan judul **“Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2022”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan dan Jumlah Penduduk secara parsial terhadap indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022?

2. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan dan Jumlah Penduduk secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, adapun kegunaan yang diharapkan sebagai berikut:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam perkembangan ilmu ekonomi terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat seperti Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan dan jumlah penduduk.

1.4.1 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatkan selama perkuliahan kepada permasalahan yang telah terjadi secara nyata serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengalaman yang berharga selama belajar di universitas.

b. Bagi Penelitian Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber rujukan untuk peneliti lain dalam membuat penelitian atau melakukan penelitian lanjutan. Khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan referensi dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan, terutama kebijakan seputar belanja modal, tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukakn di Indonesia, lebih tepatnya mengenai di Provinsi Jawa Barat. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dibuat oleh penulis berada pada rentang waktu bulan Januari 2023 dengan akhir bulan, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

